



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



SEKRETARIAT
DAERAH

Rancangan Akhir
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

TAHUN 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah	8
2.2. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah.....	79
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	79
b. Isu Strategis	80
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	81
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
3.1. Tujuan	82
3.2. Sasaran	82
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.....	88
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	91
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	92
4.1. Uraian Program	92
4.2. Uraian Kegiatan	94
4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif.....	96
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 149	
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah	153
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK	154
BAB V. PENUTUP.....	156

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	9

Daftar Tabel

Tabel 2.1	ASN Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat Daerah Tahun 2025	13
Tabel 2.3	Daftar Barang Inventaris Sekretariat Daerah	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra	39
Tabel 2.5	IKU Setda Tahun 2020.....	70
Tabel 2.6	IKU Setda Tahun 2021-2022.....	70
Tabel 2.7	IKU Setda Tahun 2023.....	71
Tabel 2.8	IKU Setda Tahun 2024.....	72
Tabel 2.9	IKK Setda Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024.....	73
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	83
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.....	89
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	91
Tabel 4.1	Target Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	100
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi Pemerintah Daerah dengan Tujuan,Sasaran, dan Program Prioritas Sekretariat Daerah.....	150
Tabel 4.3	Detai Subkegiatan terkait Program Prioritas Kab. Banyumas.....	152
Tabel 4.4	IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	153
Tabel 4.5	IKK Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Berkenaan dengan perencanaan pada SKPD, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra merupakan bentuk dari penjabaran dan teknis pelaksanaan tujuan ,sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemeritah Daerah yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran SKPD serta sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

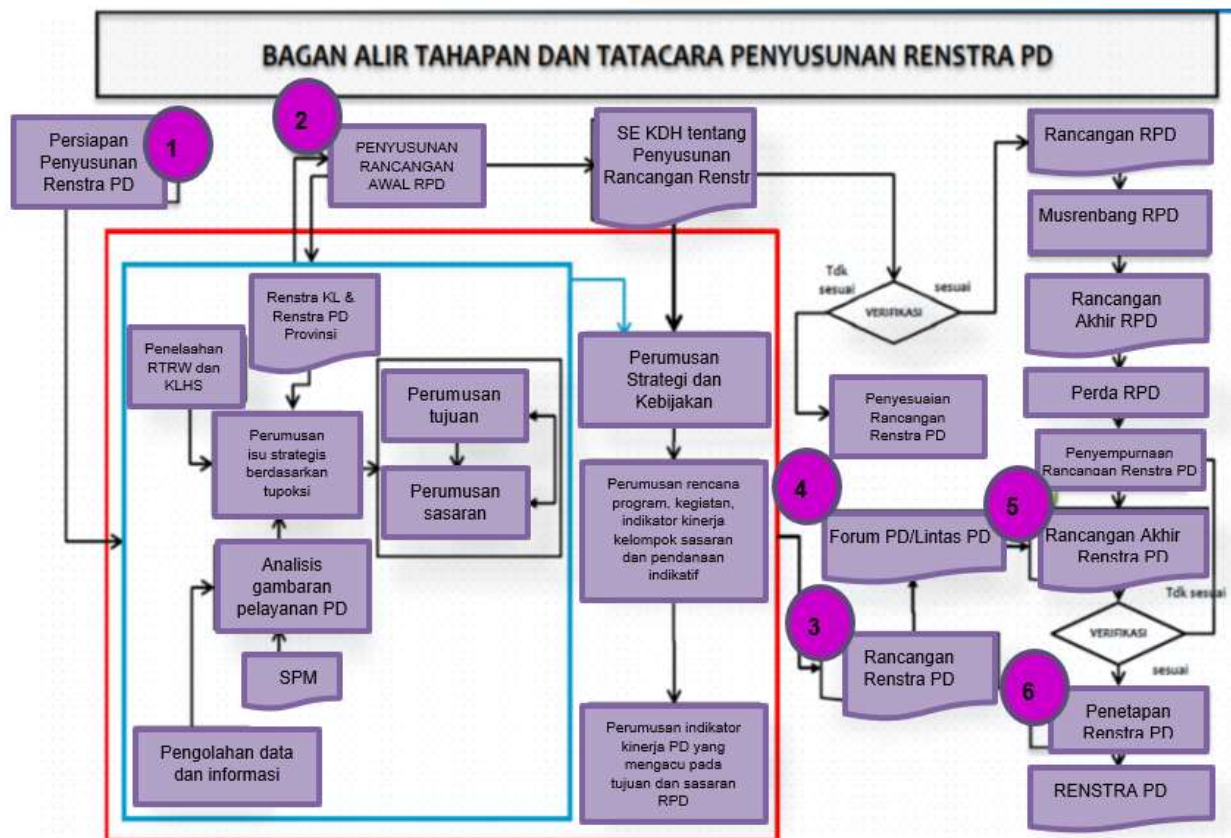
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan: (a) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta (c)

pelaksanaan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*), Sekretariat Daerah sebagai suatu “organisasi birokrasi” memerlukan kerangka kerja Strategis, dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Langkah dimaksud meliputi upaya perumusan kebijakan yang baik, peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur, kemampuan pemberian pelayanan dan upaya memfasilitasi bagi kepentingan pimpinan dan masyarakat, maupun SKPD yang berada dibawah koordinasinya, melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis ini memberikan arah untuk memanfaatkan peluang nyata dan bertanggung-jawab dalam mengaktualisasikan peran, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban.

Dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran terpilih dirumuskan kedalam strategi dan kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
 11. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 87).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dengan RPJMD setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai selama 2025-2029;

2. Sebagai acuan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan realistis;
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan koordinasi, efisiensi birokrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis dengan dokumen pelaksanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Menyediakan kerangka evaluasi kinerja yang jelas sebagai dasar pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud hingga tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi uraian terkait tugas pokok dan fungsi serta peran yang menjadi bidang urusan yang harus dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, selain itu berisi uraian terkait berbagai isu-isu strategis yang dihadapi dan harus segera diselesaikan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas pada kurun waktu Tahun 2025-2029, beserta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi uraian terkait tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Pemerintah serta uraian terkait penjabaran strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi penjabaran mengenai rangkaian program, kegiatan dan subkegiatan terpilih beserta rencana alokasi pendanaan pada Tahun 2025-2029 serta Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab V Penutup

Berisi penjelasan singkat terkait isi dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah

Struktur Sekretariat Daerah

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI



Sumber: Lampiran Perbup Nomor 87 Tahun 2025

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a) Sekretaris Daerah;
 - b) asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari:
 1. bagian tata pemerintahan dan kerja sama;
 2. bagian kesejahteraan rakyat; dan
 3. bagian hukum.
 - c) asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:
 1. bagian perekonomian dan sumber daya alam;
 2. bagian administrasi pembangunan; dan
 3. bagian pengadaan barang dan jasa, terdiri dari:
 - a) subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - b) subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - c) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - d) asisten administrasi umum, terdiri dari:

1. bagian umum, protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri atas:
 - a) subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
 - b) subbagian rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - c) subbagian protokol dan komunikasi pimpinan.
 2. bagian organisasi; dan
 3. bagian perencanaan dan keuangan yang terdiri atas subbagian keuangan dan pelaporan; dan
 - e) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- b. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber Daya Manusia

Pada akhir Tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 139 orang. Dari jumlah tersebut, 134 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Sekretariat Daerah masih didominasi oleh PNS, yang berperan dalam memberikan stabilitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas serta fungsi koordinasi pemerintahan daerah. Sementara itu, keberadaan PPPK memberikan kontribusi tambahan terutama dalam mendukung kebutuhan formasi jabatan tertentu yang bersifat teknis maupun administratif.

Secara umum, dengan jumlah 139 ASN tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kapasitas sumber daya manusia yang relatif memadai untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta peran strategis dalam mendukung Bupati dan Wakil Bupati, khususnya dalam aspek koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun demikian, optimalisasi kinerja tetap memerlukan penguatan aspek kompetensi, distribusi jabatan yang proporsional, serta

peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah data ASN berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah:

Tabel 2.1.
ASN Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1. Golongan I	1	0	1	0,574712644
2. Golongan II	14	6	20	11,49425287
3. Golongan III	51	56	107	61,49425287
4. Golongan IV	16	4	20	11,49425287
B. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK (PPPK)				
1. Golongan I	2	0	2	1,149425287
2. Golongan III	0	0	0	0
3. Golongan V	8	4	12	6,896551724
4. Golongan VII	1	1	2	1,149425287
5. Golongan IX	2	8	10	5,747126437
Jumlah	95	79	174	100

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai PNS di Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Golongan I dengan jumlah paling sedikit, yaitu 1 orang laki-laki atau 0,5747% dari total pegawai.
2. Golongan II berjumlah 24 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan atau 11,4942% dari total pegawai.
3. Golongan III menjadi kelompok terbesar dengan 107 orang terdiri dari 51 laki-laki dan 56 perempuan, mencapai 61,4942 % dari keseluruhan pegawai.
4. Golongan IV berjumlah 20 orang terdiri dari 16 laki-laki dan 4 perempuan, atau 11,4942% dari total pegawai.

Sementara itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 26 orang dengan rincian:

1. Golongan I, dengan jumlah 2 orang laki-laki,
2. Golongan V, dengan jumlah 12 orang terdiri dari 8 orang laki-

laki dan 4 orang perempuan,

3. Golongan VII, dengan jumlah 2 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan,
4. Golongan IX, dengan jumlah 10 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 8 perempuan.

Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat Daerah
Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	4	0	4	2,298850575
SMP	3	0	3	1,724137931
SMA	25	12	37	21,26436782
D-I	0	0	0	0
D-II	0	0	0	0
D-III	7	8	15	8,620689655
S-1	50	48	98	56,32183908
S-2	13	3	16	9,195402299
S-3	1	0	1	0,574712644
Jumlah	103	71	174	100

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S-1), yaitu 98 orang (56,321%) terdiri dari 50 laki-laki dan 48 perempuan. Sebagian besar ASN memiliki pendidikan setidaknya SMA atau lebih tinggi. Tidak ada ASN Sekretariat Daerah dengan pendidikan D-I dan D-II. Sedangkan D-III ada 15 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 8 perempuan. ASN dengan pendidikan SMA sebanyak 37 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 12 Perempuan. Dan untuk ASN dengan Pendidikan SMP ada 3 orang dan semuanya laki-laki. Dari seluruh jumlah ASN sebanyak 174 orang, hanya terdapat 1 (satu) ASN (0,57%) yang telah mencapai tingkat pendidikan Doktor (S-3).

Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kelancaran kerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain :

- a. Tanah : 87.529 M²
- b. Bangunan Gedung : 8.025 M²

Beberapa ini adalah barang inventaris sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah:

Tabel 2.3.

Daftar Barang Inventaris Sekretariat Daerah

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
1	AC Unit	2008	Panasonic	1,5 PK	APBD Kab.	Bagian Umum	Baik
2	AC Unit	2008	Toshiba / th. 2008		APBD Kab.	Humas Protokol	Baik
3	AC / Kipas angin	2013		1 PK	APBD Kab.	Bagian umum	Baik
4	AC	2013	sharp / ah-a5mey	1/2 pk	APBD Kab.	Bagian pembangunan	Baik
5	AC	2014	Panasonic	2 PK	APBD Kab.	Graha Satria	Baik
6	AC	2014	Panasonic	2 PK	APBD Kab.	TU Umum	Baik
7	AC	2014	Panasonic	2 PK	APBD Kab.	Aspemin	Baik
8	AC	2014	Panasonic	2 PK	APBD Kab.	Sekda	Baik
9	AC	2014	Panasonic	2 PK	APBD Kab.	Sasanawilis	Baik
10	AC Unit	2015	Panasonic / CS-YN9SKJ	1 PK	APBD Kab.	R. Staf TU Wabup	Baik
11	AC Unit	2015	Panasonic / CS-PN12 RKJ	1,5 PK	APBD Kab.	RR. Bagian Hukum	Baik
12	AC Unit	2015	Panasonic / CS-PN12RKJ	1,5 PK	APBD Kab.	Aula TU Wabup	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
13	AC Unit	2015	Panasonic / PN 18 RKJ	2 PK	APBD Kab.	TU Sekda	Baik
14	AC Unit	2015	Panasonic / CS- PN18RKP	2 PK	APBD Kab.	R Staf RTP	Baik
15	AC Unit	2015	Panasonic / PN 18 RKJ	2 PK	APBD Kab.	TU Bupati	Baik
16	AC	2016	Panasonic 1 PK / PN09SKJ		APBD Kab.		Baik
17	AC	2016	Panasonic 1,5 PK / CS- PN12SKJ		APBD Kab.	R. Arsip Bag. Keuangan	Baik
18	AC	2016	Panasonic 1,5 PK / PN12SKJ		APBD Kab.		Baik
19	AC	2016	Panasoni 2 PK / PN18SKP		APBD Kab.		Baik
20	AC	2017	Panasonic / PN09SKJ	1 PK	APBD Kab.		Baik
21	AC	2017	Panasonic / PN12SKJ	1,5 PK	APBD Kab.		Baik
22	AC	2017	Panasonic / PN18SKJ	2 PK	APBD Kab.		Baik
23	AC Unit	2017	Sharp / AHA 0,5 UCY		APBD Kab.		Baik
24	AC Unit	2018	Panasonic / PN185KP	2 PK	APBD Kab.		Baik
25	AC Unit	2018	Panasonic / CS- PN12SKJ	1.5 PK	APBD Kab.	RR Sekda	Baik
26	AC Unit	2018	Panasonic / CS- YN9RKJ		APBD Kab.	Aula TU Wabup	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
27	AC Unit	2019	Panasonic 1,5 PK type YN 12TJ		APBD Kab.		Baik
28	AC Split LG 1,5 PK type T13V4	2019	LG 1,5 PK type T13V4		APBD Kab.		Baik
29	AC Unit	2019	SHARP		APBD Kab.		Baik
30	AC Unit	2019	Sharp / 12 UCY	1,5 PK	APBD Kab.		Baik
31	AC Unit	2019	Sharp / 09 UCY	1 PK	APBD Kab.		Baik
32	AC Unit	2020	Shap		APBD Kab.		Baik
33	AC	2020	Panasonic	2 PK	APBD Kab.		Baik
34	AC	2020	Panasonic	2 PK	APBD Kab.		Baik
35	AC Split	2008	Panasonic		APBD Kab.	Umum	Baik
36	AC Split	2008	Panasonic / CS- YN9SKJ		APBD Kab.	Santel/ kominfo	Baik
37	AC Split	2008	Panasonic	1/2 pk	APBD Kab.	TU Bupati	Baik
38	AC Split	2012	Panasonic	1 PK	APBD Kab.	Umum Santel	Baik
39	AC Split	2012	Toshiba / RAS- 18N3KPX -ID	2 pk	APBD Kab.	R. Pelatihan LPSE	Baik
40	AC Split	2012	Toshiba / RAS- 18N3KPX -ID	2 pk	APBD Kab.	RR. Bagian Layanan Pengadaan	Baik
41	AC Split	2012	Toshiba / RAS- 18N3KP	2 pk	APBD Kab.		Baik
42	AC Split	2012	Toshiba / RAS- 18N3KP	2 pk	APBD Kab.	Santel/ kominfo	Baik
43	AC Split	2012	Samsung	1,5 PK	APBD Kab.	HUKUM	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
44	AC Split	2014	Panasoni k / KC 05QKJ	0,5 pk	APBD Kab.	ULP	Baik
45	AC Split	2014	panasoni k	1,5 pk	APBD Kab.	RD WABUB	Baik
46	AC Portable	2017	Miedea / MPF 09CRN1	1 PK	APBD Kab.		Baik
47	AC Portable	2017	Miedea / MPF 12 CRN	2 PK	APBD Kab.		Baik
48	AC (Air Conditio ner)	2022	Panasonic / CS- ZN12 WKP	1,5 PK	APBD Kab.	Setda	Baik
49	AC (Air Conditio ner)	2022	Panasonic / CS- ZN12 WKP	1,5 PK	APBD Kab.	Ruang Wabup	Baik
50	AC (Air Conditio ner)	2022	Panasonic / CS- ZN12 WKP	1,5 PK	APBD Kab.	RD Bupati	Baik
51	AC Unit	2021	Sharp / AH 09 UCYN		APBD Kab.	Bag. Umum/ Kabag Umum	Baik
52	AC Unit	2021	Sharp / AH 09 UCYN		APBD Kab.		Baik
53	AC Split	2021	Sharp / AHA 12 UCY	1,5 PK	APBD Kab.	RD WABUP	Baik
54	AC	2021	Panasonic / CS- ZN5WKP	0,5 PK	APBD Kab.	RD WABUP	Baik
55	Laptop	2019	DELL INSPIRON / 15- 5583	15,6 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Eliati	Baik
56	Laptop	2019	DELL INSPIRON / 15- 5583	15,6 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Sugeng S.	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
57	Laptop	2016	Acer Aspire / ES-473G	Intel I 3- 5005U, 500 GB	APBD Kab.	Pengembalia n dari TU Asmin/ Eko (Belum diusulkan penjualan)	Baik
58	Laptop	2020	Asus / P1440UF- FAOO39R	14"	APBD Kab.	Pembangun an/ M. Ma'rup	Baik
59	Laptop	2020	Acer / Aspire 5 A515-52G	14"	APBD Kab.	TU Umum/ Reni	Baik
60	Laptop	2020	Acer / Aspire 5 A515-52G	14"	APBD Kab.	Protokol/ Laila	Baik
61	Laptop	2020	Acer / Aspire 5 A515-52G	14"	APBD Kab.		Baik
62	Laptop	2020	Asus / P1440UF- FA0039R	14"	APBD Kab.	Pembangun an/ Pak Dody	Baik
63	Laptop	2023	Lenovo / Yoga 6- 13ABR8		APBD Kab.	Bag. Pembangun an/ Pak Ma'ruf	Baik
64	Laptop	2023	Lenovo / Ideapad Flex 5 14IRU8		APBD Kab.	Ka TU/ Nurwendi Herman Juhdi, S.IP	Baik
65	Laptop	2023	Lenovo / Ideapad i5 Duet 5 12I		APBD Kab.	Asmin/ Agus Nur Hadie	Baik
66	Laptop	2023	Lenovo / Ideapad i5 Duet 5 12I		APBD Kab.	Aspem/ Nungky Hary Rachmat	Baik
67	Laptop	2023	Lenovo / Ideapad Slim 3 14TL6		APBD Kab.	Bag. Hukum/ Pak Gunawan	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
68	Laptop	2023	Lenovo / Ideapad Slim 3 14TL6		APBD Kab.	Bag. Hukum/ Bu Endah	Baik
69	Laptop	2023	Axioo / Mybook Pro H5 (8S5)		APBD Kab.	Bag. Hukum/ Pak Ilham-Amalia	Baik
70	Laptop	2024	HP / 14-EP0022T U/Core i7	14 Inch	APBD Kab.	Bag. Organisasi/ Mas Latif	Baik
71	Laptop	2024	Asus / P1412CE AID-EK3450W	14 Inch	APBD Kab.	RTP/ Pak Didi	Baik
72	Laptop	2024	Lenovo / Ideapad i5 Duet 5 12IA	12,4 Inch	APBD Kab.	Aspemkesra / Pak Junaidi	Baik
73	Laptop	2024	MSI / Modern 14-C13M-875ID	14 Inch	APBD Kab.	Prokompim-Dokpim/ Pandu	Baik
74	Laptop	2024	Lenovo / Legion Pro 5 16IRX8 8	16 Inch	APBD Kab.	Tim Media PJ Bupati	Baik
75	Komputer Noot book (Laptop)	2011	Toshiba / Core1,3 M370 2,4 Gh		APBD	Bagian Pemerintahan (rusak)	Baik
76	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	Kasubbag Prokompi/ Bambang	Baik
77	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	Bag. Pemerintahan	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
78	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	Pengembalian dari Pak Ma'rup Pembangunan (Belum diusulkan penghapusan)	Baik
79	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	RTP/ Suyono	Baik
80	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	Pembangunan	Baik
81	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	Keuangan/ Bu Titin	Baik
82	Laptop	2019	ACER / SPIN 3 SP314-52	14 Inchi	APBD Kab.	TU Aspemra	Baik
83	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Sugeng	Baik
84	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Dewi N.	Baik
85	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Doddy E.	Baik
86	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Elly	Baik
87	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Danang	Baik
88	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Ridha	Baik
89	Laptop	2019	HP / 240 G7	14 Inchi	APBD Kab.	Balapan/ Galih A.	Baik
90	Mobil	1997	Toyota kijang	1998 cc	APBD	Kend. Ops TU Bupati	Baik
91	Mobil	2006	Mishubishi / Open Cup	1343 cc	APBD	Kend.Ops Pool/ Bag. Umuml (Eks R 9566 BH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
92	Mobil	2013	TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 M/T		APBD Kab.	EX R 105 A di dindik	Baik
93	Mobil MPV	2022	Toyota / Innova Zenix 2.0 HV	1987 cc	APBD Kab.		Baik
94	Sepeda Motor	1993	Honda / ASTREA GRAND	100 cc	APBD	Bag. Pemerintahan / EPM Susilaningrum	Baik
95	Sepeda Motor	1994	Honda / Win MCB	100 cc	APBD Kab.	Bagian Humas/Heri Purwanto, SH	Baik
96	Sepeda Motor	1995	Honda	100 cc	APBD	Bag. Prokompim / Margian Budi Utomo-Driver (Ex R 9878 DH)	Baik
97	Sepeda Motor	1995	Honda / Supra Fit	100 cc	APBD Kab.	Bag. Umum/ Sumarno (Ex R 9654 CH)	Baik
98	Sepeda Motor	1995	Yamaha / RX King	135	APBD Kab.	TU Sekda/ Edi Wahyono-Driver (Ex R 9947 BH)	Baik
99	Sepeda Motor	1997	Bravo / RC 100	100 cc	APBD Kab.	Eks. Bapermas	Baik
100	Sepeda Motor	2000	Honda	100 cc	APBD	Bag. Umum-Rumdin Wabup/ Taat (Ex R 9813 BH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
101	Sepeda Motor	2000	Honda / C 100	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Sisworo-Driver (Ex R 9674 BH)	Baik
102	Sepeda Motor	2000	Honda	100 cc	APBD	Bagian Umum-PKK/ Khadirin (Ex R 9808 BH)	Baik
103	Sepeda Motor	2001	Honda / NF/ 100 D (Supra)	100 cc	APBD	Sudah dikembalikan ke BKAD th 2022	Baik
104	Sepeda Motor	2002	Honda / Supra X	100 cc	APBD.	Bag. Umum/Sun aryo-Wisma Praja (Ex R 9717 CH)	Baik
105	Sepeda Motor	2003	Honda Win	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Listiono (Ex R 9908 EH)	Baik
106	Sepeda Motor	2003	HONDA	100 cc	APBD Kab.	Bag. Umum-RTP/ Toto Riyanto	Baik
107	Sepeda Motor	2003	Honda / Supra Fit	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Rizky Aditya-Driver	Baik
108	Sepeda Motor	2004	Supra NF 100	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Sariman	Baik
109	Sepeda Motor	2004	Honda Win	100 cc	APBD	Bag. Umum	Baik
110	Sepeda Motor	2004	Honda / Legenda	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Udi Waluyo-Driver (Ex R 9950 EH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
111	Sepeda Motor	2004	Honda	100 cc	APBD	Bag. Organisasi / Asih Cahyawati	Baik
112	Sepeda Motor	2006	Honda / Supra Fit	100 cc	APBD	Bag. Umum-TU Asmin/ Eko Pujianto (Ex R 9652 CH)	Baik
113	Sepeda Motor	2006	HONDA / Supra Fit		APBD	Bag. Kesr/A. Ngisomudin (Ex R 9649 CH)	Baik
114	Sepeda Motor	2006	Supra Fit	100 cc	APBD	Bag. Layanan Pengadaan/ Gesang Prasetyo (Ex R 9655 CH)	Baik
115	Sepeda Motor	2006	Supra Fit	100 cc	APBD	Bag. Umum/ Niko-Pakan Rusa	Baik
116	Sepeda Motor	2006	Supra Fit	100 cc	APBD	Bag. Umum-RTP/ Marlan (Ex 9658 CH)	Baik
117	Sepeda Motor	2006	Honda Supra Fit	100 cc	APBD.	Bag. Pemerintahan / Suparwoto, SH (Eks R 9656 CH)	Baik
118	Sepeda Motor	2006	Suzuki / Smash	100 cc	APBD.	Bag. Umum-TU Staf Ahli/ Sukirman (Ex R 9814 DH)	Baik
119	Sepeda Motor	2006	Honda/Nf 100sl	100 cc	Pembelian	Bag. Hukum/ Nardi (Ex R 9647 CH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
120	Sepeda Motor	2006	Honda / Supra Fit	100 cc	APBD Kab.	Bag. Umum/ Sodik- Wisma Praja (Ex R 9657 CH)	Baik
121	Sepeda Motor	2006	Honda / NF 100 SL	100 CC	Pembelian		Baik
122	Sepeda Motor	2007	Suzuki / Smash	100 cc	APBD	Bag. Kesra/ Tohidin (Ex R 9759 DH)	Baik
123	Sepeda Motor	2007	Suzuki Smash	110 cc	APBD	Bag. Umum/ Bambang Setiadi- Rumdin Wabup (Ex R 9720 DH)	Baik
124	Sepeda Motor	2007	Suzuki Tunder	125 cc	APBD	Bag. Layanan Pengadaan/ Andi Meitarto (Ex R 9684 DH)	Baik
125	Sepeda Motor	2007	Suzuki Smash	110 cc	APBD	Bag. Kesra/Moh. Hevel (Ex R 9820 DH)	Baik
126	Sepeda Motor	2007	Honda / Astrea	110 cc	Pembelian	Bag. Umum/ Sugito (Ex R 9812 BH)	Baik
127	Sepeda Motor	2007	Suzuki/ Smash	110 cc	APBD Kab.	Bag. Pemerintah an /Yuni Setiyarini (Ex R 9758 DH)	Baik
128	Sepeda Motor	2007	Suzuki / Smash	110 cc	APBD	Bag. Hukum/ Agus Taruno (Ex R 9786 DH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
129	Sepeda Motor	2007	Suzuki / Smash	100 cc	Pembelian	Bag. Umum-RTP/ Rokhid (Ex R 9766 DH)	Baik
130	Sepeda Motor	2011	Suzuki FW110 SD	113 cc	APBD Kab.	Bag. Prokompim-Dokpim/ Dodo Susanto	Baik
131	Sepeda Motor	2011	Suzuki FW110 SD	113 cc	APBD Kab.	Bag. Layanan Pengadaan-Ksb LPSE/ Nunik N. (Ex R 9829 FH)	Baik
132	Sepeda Motor	2011	Honda / NF125 TD	125 cc	APBD Kab.	TU Umum/ Suparto (Ex R 9807 PH)	Baik
133	Sepeda Motor	2012	Honda / NEW REVO SPOKE	110	APBD Kab.	TU Bupati/ Catur Setiawan (Ex R 9951 FH)	Baik
134	Sepeda Motor	2012	HONDA / NEW REVO SPOKE	110	APBD Kab.	Bag. Layanan Pengadaan/ Driantoro (Ex R 9999 FH)	Baik
135	Sepeda Motor	2012	HONDA REVO / NF11B2D 1 M/T	110 CC	APBD Kab.	Dikembalikan ke Bidang Aset tgl 4 juli 2022	Baik
136	Sepeda Motor	2012	Honda / Revo	110 cc	APBD Kab.	dari DPPKAD	Baik
137	Sepeda Motor	2013	yamaha IDY		APBD Kab.	Bag. Umum/ Agus Sunanto (Ex R 9702 GH)	Baik
138	Sepeda Motor	2013	yamaha IDY		APBD Kab.	Bag. Umum-Kepegawaian/ Suyono	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
						(Ex R 9703 GH)	
139	Sepeda Motor	2013	yamaha vega / 5D9 Hitam	113 cc	APBD Kab.	Bag. Prokompim / Parsito (Ex R 9705 GH)	Baik
140	Sepeda Motor	2013	Yamaha IDY	113 cc	APBD Kab.	TU Wabup/ Hendro (Ex R 9706 GH)	Baik
141	Sepeda Motor	2013	yamaha IDY		APBD Kab.	Bag. Umum-Ksb. Keuangan/ Midin (Ex R 9707 GH)	Baik
142	Sepeda Motor	2013	Yamaha / Vega RR/5D9		APBD Kab.	Bag. Layanan Pengadaan/ Teguh Sulistiono (Ex R 9722 GH)	Baik
143	Sepeda Motor	2013	Yamaha / 1DY		APBD Kab.	Bag. Perekonomian/ Rochman Legowo (Ex R 9704 GH)	Baik
144	Sepeda Motor	2013	Yamaha vega r / 5d9		APBD Kab.	Bag. Pembangunan/ Sugeng Subekti (Ex R 9737 GH)	Baik
145	Sepeda Motor	2013	Yamaha / Vega RR DB	115	APBD Kab.	EX R 9723 GH	Baik
146	Sepeda Motor	2013	Yamaha / Vega RR DB	110 cc	APBD Kab.	EX R 9739 GH	Baik
147	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Vega RR/5D9	115 CC	APBD Kab.	Bag. Perekonomian/ Andri Suciyanto	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
148	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Vega RR/5D9	115 CC	APBD Kab.	Bag. Perekonomian/ Evi Kusumawar dani	Baik
149	Sepeda Motor	2014	Yamaha / New Vixion 1PA	150 CC	APBD Kab.	Bag. Layanan Pengadaan/ Danang Arif	Baik
150	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Vega RR DB	114 CC	APBD Kab.	Bag. Umum	Baik
151	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Vega RR DB	114 CC	APBD Kab.	Bag. Pembangunan/ Djamati	Baik
152	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Prokompim-Protokol/ Ganang Ramadhan (Ex R 9621 JH)	Baik
153	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Layanan Pengadaan/ Sugeng Dwi H. (Ex R 9633 JH)	Baik
154	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Pemerintahan/ Sugeng Budi (Ex R 9611 JH)	Baik
155	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Kesra/ Ari Purwoko (Ex R 9612 JH)	Baik
156	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Kesra/ Lasmi Astutik (Ex R 9669 JH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
157	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	APBD Kab.	Bag. Prokompim-Kompi/ Sudin (Eks R 9661 JH)	Baik
158	Sepeda Motor	2015	Yamaha / 2TP (New Vixion Adv)	150 cc	APBD Kab.	Bag. Kesra/ Dedy Sutomo (Ex R 9733 JH)	Baik
159	Sepeda Motor	2015	Yamaha / 2TP (New Vixion Adv)	150 cc	APBD Kab.	Bag. Umum-RTP/ Purno Santoso-Driver (Ex R 9739 JH)	Baik
160	Sepeda Motor	2015	Yamaha / 2TP (New Vixion Adv)	150 cc	APBD Kab.	Bag. Umum/ Nasor Fuadi-Driver (Ex 9709 JH)	Baik
161	Sepeda Motor	2015	Kawasaki / Trail KLX 150 G	150 CC	APBD Kab.	Bag. Umum-TU Bupati/ Hananto-Driver (Ex R 9754 JH)	Baik
162	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	Bag. Pembangunan/ Dody Sulistiyo (Ex R 9871 JH)	Baik
163	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	TU Staf Ahli/ Fitriyani (Ex R 9910 JH)	Baik
164	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	TU Sekda/ Warsito (Ex R 9911 JH)	Baik
165	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	TU Aspemkesra / Mutakin-Driver (Ex R 9912 JH)	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
166	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	SETDA, Bagian Umum	Baik
167	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	APBD Kab.	ex. R 9956 JH	Baik
168	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	113 cc	APBD Kab.	Bag. Prokompim-Ksb Protokol/ Rio Chairil Anam (Ex R 9665 KH)	Baik
169	Sepeda Motor	2017	Yamaha / MIO	125 cc	APBD Kab.	Bag. Organisasi/ Wiwid Widyastuti (Ex R 9648 KH)	Baik
170	Sepeda Motor	2017	Yamaha / MIO	125 cc	APBD Kab.	Bag. Umum-Rumdin Bupati/ Mujiono (Ex R 9647 KH)	Baik
171	Sepeda Motor	2017	Yamaha / MIO	125 cc	APBD Kab.	TU Asmin/ Kurnia Mudatama (Ex R 9622 KH)	Baik
172	Sepeda Motor	2017	Yamaha / MIO	125 cc	APBD Kab.	TU Wakil Bupati-Ka. TU/ Luciana Retnowati (Ex R 9989 JH)	Baik
173	Sepeda Motor	2018	Yamaha / Mio B3B A/T	125 cc	APBD Kab.	TU Bupati/ digunakan Desi-PKK	Baik
174	Sepeda Motor	2018	Yamaha / Mio B3B A/T	125 cc	APBD Kab.	Bag. Umum-TU Umum/ Rumiya	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
						(Ex R 9928 KH)	
175	Sepeda Motor	2018	Yamaha / Mio B3B A/T	125 cc	APBD Kab.	SETDA / Bag. Hukum EX R 9927 KH	Baik
176	Sepeda Motor	2018	Yamaha / Jupiter Z1 CWN Fi	113 cc	APBD Kab.	EX R 9838 KH	Baik
177	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/1699/I V/2020 13/04/2020	Baik
178	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/1699/I V/2020 13/04/2020	Baik
179	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/1699/I V/2020 13/04/2020	Baik
180	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/1699/I V/2020 13/04/2020	Baik
181	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/5898.1 /XII/2020 21/12/2020	Baik
182	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Dari BKAD 024/5898.1 /XII/2020 21/12/2020	Baik
183	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Ke SETDA 024/1699/I V/2020 13/04/2020	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
184	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Ke SETDA 024/1699/IV/2020 13/04/2020	Baik
185	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / B3B A/T (MIO S)	125cc	APBD Kab.	Ke SETDA 024/1699/IV/2020 13/04/2020	Baik
186	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version / B3	125 CC	APBD Kab.		Baik
187	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125		APBD Kab.		Baik
188	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125		APBD Kab.		Baik
189	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125		APBD Kab.		Baik
190	Sepeda Motor	2023	Yamaha / All New Vixion (BK8 M		APBD Kab.		Baik
191	Printer	2005			APBD Kab.		Baik
192	Printer	2008	Pixma / IP 3500		APBD Kab.	PEMDES	Baik
193	Printer	2012	Hp.1102 W / Lasetjet		APBD Kab.	Bag. Hukum	Baik
194	Printer	2012	EPSON / L110		APBD Kab.	Bag. Pembangunan	Baik
195	Printer	2013	canon / ip.2770		APBD Kab.	bagian pemerintahan	Baik
196	Printer	2013	Canon / ip.2770		APBD Kab.	bagian pemerintahan	Baik
197	Printer	2013	Laser / HP 1536		APBD Kab.	Bagian umum	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
198	Printer	2013			APBD Kab.	bagian pemerintahan	Baik
199	Printer	2013	Epson / L 100		APBD Kab.	bagian kesra	Baik
200	Printer	2014	Injek epson / L550		APBD Kab.	R TU Sekda	Baik
201	Printer	2014	Injek epson / L550		APBD Kab.	R TU Umum	Baik
202	Printer	2014	Injek epson / L550		APBD Kab.	R Asekbang	Baik
203	Printer	2014	Laser HP / M177FW		APBD Kab.	R Sekda	Baik
204	Printer	2014	Epson / L 555		APBD Kab.	Staf Ahli	Baik
205	Printer	2014	Epson / L 555		APBD Kab.	Kesra	Baik
206	Printer	2015	HP / M 451 NW		APBD Kab.	Bagian Perekonomian	Baik
207	Printer Inject	2015	Epson / L 555		APBD Kab.	Bagian Organisasi	Baik
208	Printer Inject	2015	Epson / L 555		APBD Kab.	TU Wabup	Baik
209	Printer Inject	2015	Epson / L 555		APBD Kab.	Bagian Perekonomian	Baik
210	Printer	2016	Epson / L 355		APBD Kab.	Bagian Pembangunan	Baik
211	Printer	2016	Epson / L 355		APBD Kab.	Bagian Organisasi	Baik
212	Printer	2016	Epson / L 355		APBD Kab.	Bagian Hukum	Baik
213	Printer Inject	2016	Epson / L 565	A4,5760x1440 DPI	APBD Kab.		Baik
214	Printer	2017	Epson / L 1300	5760 X 1440 DPI	APBD Kab.		Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
215	Printer	2017	Epson / L565	5760 x 1440 DPI	APBD Kab.		Baik
216	Printer	2017	HP Pro / M 177fw	600 x 600 DPI	APBD Kab.		Baik
217	Printer	2017	Epson / LQ 2190		APBD Kab.		Baik
218	Printer Inject	2018	Epson / L565	A4,576 0X1440 DPI	APBD Kab.	Bagian Organisasi	Baik
219	Printer Inject	2018	Epson / L565	A4,576 0X1440 DPI	APBD Kab.		Baik
220	Printer Multifunction Inject	2018	Canon / G2010	4800X1200 DPI	APBD Kab.	Rtp	Baik
221	Printer Inject	2018	Epson / L 805	5760 x 1440 DPI	APBD Kab.		Baik
222	Printer Inject	2018	Epson / L 805	5760 x 1440 DPI	APBD Kab.		Baik
223	Printer	2020	Epson / L6190		APBD Kab.		Baik
224	Printer	2020	Canon		APBD Kab.		Baik
225	Printer	2002	HP / Laserjet		APBD Kab.	Bag. Orgasnisasi	Baik
226	Printer	2012	HP / IP 2770		APBD Kab.	Bag. Humas Protokol	Baik
227	Printer	2012	Canon / IP 2770		APBD Kab.	Bag. Humas Protokol	Baik
228	Printer	2012	HP LaserJet / 1536dnf MFP		APBD Kab.	Humas & Protokol	Baik
229	Printer	2019	Epson / L 6170		APBD Kab.		Baik
230	Printer	2019	Epson / L 4150		APBD Kab.		Baik
231	Printer	2019	Epson / L 5190		APBD Kab.		Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
232	Printer	2020	Canon / Inkjet M PIXMA G2010		APBD Kab.		Baik
233	Printer	2020	Canon / Inkjet M PIXMA G2010		APBD Kab.		Baik
234	Printer	2020	EPSON / L 1110		APBD Kab.	Bag. Pembangunan/ R. Kabag	Baik
235	Printer	2020	EPSON / L 1110		APBD Kab.		Baik
236	Printer	2020	Canon / Laser Color MF643CD W		APBD Kab.		Baik
237	Printer	2021	Epson / L 3210		APBD Kab.	RR. Bag. Hukum	Baik
238	Printer	2021	Epson / L5190	5760 X 1440D PI	APBD Kab.	RR. Bag. Hukum	Baik
239	Printer	2021	Epson / L5190	5760 x 1440 DPI	APBD Kab.	Bagian Hukum	Baik
240	Printer	2021	Epson / L 5190	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	Bagian Hukum	Baik
241	Printer	2021	Epson / L4150	5760x1440 DPI	APBD Kab.		Baik
242	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	TU Bupati	Baik
243	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	TU Asminum	Baik
244	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	TU Umum	Baik
245	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	Pemerintahan	Baik
246	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	RD Wabup	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
247	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	Pembangunan	Baik
248	Printer	2022	Epson / L 5290		APBD Kab.	LPSE	Baik
249	Printer	2022	Epson / L4150	5760 x 1440 DPI	APBD Kab.	Bagian Layanan Pengadaan	Baik
250	Printer	2022	Epson / LQ 2190		APBD Kab.	Keuangan	Baik
251	Printer	2022	Epson / L4260		APBD Kab.	TU Bupati	Baik
252	Printer	2022	Epson / L4260		APBD Kab.	Organisasi	Baik
253	Printer	2022	Epson / L4260		APBD Kab.	Gudang RTP (belum di distribusikan)	Baik
254	Printer	2023	Epson / LX-310		APBD Kab.	Sub Bag Keuangan (Ika)	Baik
255	Printer	2023	Epson / Eco Tank L4250		APBD Kab.	Bag. Kesra (4 Juli 2023)	Baik
256	Printer	2023	Epson / Eco Tank L3250		APBD Kab.	Pak Didi RTP	Baik
257	Printer	2023	Epson / Eco Tank L3250		APBD Kab.	Pak Eko (Kasubbag TU Umum)	Baik
258	Printer	2023	Epson / Eco Tank L3250		APBD Kab.	Pak Partenk (Kepegawaian)	Baik
259	Printer	2023	Epson / Eco Tank L3250		APBD Kab.	Mas Ores (Prokompi)	Baik
260	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Epson / L5290		APBD Kab.	Pembangunan	Baik

No	Nama / Jenis	Tahun	Merk	Ukuran	Asal usul	Keterangan	Kondisi
261	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Epson / L5290		APBD Kab.	Aspemkesra	Baik
262	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Epson / L5290		APBD Kab.	TU Umum-Pak Suparto	Baik
263	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Epson / L5290		APBD Kab.	Cadangan RTP/ Dipinjam Keuangan Desember 2023	Baik

Sumber: KIB Sekretariat Daerah

Sarana dan Prasarana yang tersedia di lingkungan Sekretariat Daerah sudah dapat mendukung kegiatan operasional pada masing-masing bagian, walaupun belum sepenuhnya memadai. Sehingga agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lebih efektif, maka perlu ada penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun berjalan menunjukkan peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam bidang administrasi, koordinasi, serta perumusan kebijakan, Sekretariat Daerah berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan administrasi pemerintahan, fasilitasi rapat koordinasi, penyusunan kebijakan, hingga pelayanan keprotokolan dan komunikasi publik dilaksanakan secara terintegrasi dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi

dan transparansi. Melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang mendukung tercapainya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah selama tahun 2025-2029 akan dilaksanakan Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Melalui Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 205-2029 telah ditetapkan garis-garis besar tujuan, sasaran beserta indikator-indikator terukur bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

- Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas secara umum telah dapat melaksanakan tugas dengan gambaran pencapaian seperti pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		22		23	
					K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p
1	[Tujuan] Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif																											
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Kabupaten Banyumas	Nilai	80.53	80		80.60		80.65		80		81.79					102.24						102.24				
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Kabupaten Banyumas	Nilai	3.250	3.1		3.3		3.32		3.100		3.381					109.06						109.06				
2	[Sasaran] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengendalian Instansi																											

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir			
							2024		2025	2026	2024		2025	2026	2024		2025	2026												
	Sekretariat Daerah																													
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai		89.75		90		90.1		89.75		90					100.28							100.28					
		Persentase Capaian Kinerja Sekreariat Daerah	%		100		100		100		100		116.56					116.56							116.56					
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP	%	51	50		50		100		50		100					200							200					
3	[Program] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT							10.132.082.488						9.729.011.038					95.96											
		Persentase Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi	%		100		100		100		100		120					120							120					
		Persentase kerjasama daerah dan pengembanga	%		100		100		100		100		100					100							100					

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		n potensi daerah yang terfasilitasi																										
		Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi	%	12	100		100		100		100		177.78					177.78							177.78			
		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPPD	Nilai	3.44	3.7		3.51		3.6		3.7																	
4	[Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							8.294.093.620					7.925.608.500						95.56									
		Jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di fasilitasi	aturan	11	5		5		5		5		6					120							120			
5	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							650.000.000					608.335.900						93.59									

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke					Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026	2024		2025		2026		2024		2025		2026						
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		1		1		1		1		6					600						600				
6	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							690.000.000						647.021.600					93.79									

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	18	1		1		1		1		8					800						800				
7	[Sub Kegiatan] Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual							6.954.093.620						6.670.251.000					95.87									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	8	1		1		1		1		3					300						300				
8	[Kegiatan] Fasilitas dan Koordinasi Hukum							945.988.868						914.692.870					96.65									
		Jumlah permasalahan Hukum yang	Kasus	12	9		9		9		9		16					177.78						177.78				

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		terfasilitasi dan terkoordinasi																										
		Persentase Peraturan Perundang Undangan yang harmonis	%		100		100		100		100						100							100				
		Persentase Peraturan Perundang undangan yang lulus uji yudisial	%		100		100		100		100						100							100				
9	[Sub Kegiatan] Fasilitasi Bantuan Hukum						319.802.880						298.247.400					93.26										
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12	9		9		9		9		16					177.78						177.78				
10	[Sub Kegiatan] Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						375.155.500						366.184.200					97.6										
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	764	615		615		615		615		1406					228.62						228.62				
11	[Sub Kegiatan] Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan						251.030.488						250.261.270					99.68										

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026						
	Informasi Hukum																												
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	117	380		380		380		380		406						106.84							106.84			
12	[Kegiatan] Administrasi Tata Pemerintahan						810.000.000						806.754.968						99.61										
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang telah dilaksanakan penegasan batas wilayah	%		100		100		100		100		100						100							100			
		Persentase Kecamatan yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati	%	100	100		100		100		100		0						0							0			
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPJ	%	100	100		100		100		100		100						100							100			

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		sesuai dengan peraturan perundang undangan																										
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	100	100		100		100		100		100					100						100				
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	%	100	100		100		100		100		100					100						100				
13	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						160.000.000					158.793.642						99.21										

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		3		3		3		3		5						166.67						166.67			
14	[Sub Kegiatan] Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah							470.000.000						468.316.200						99.63								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	7	1		2		1		1		8						800						800			
15	[Sub Kegiatan] Penataan Administrasi Pemerintahan							180.000.000						179.645.126						99.78								
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	9	1		3		1		1		4						400						400			
16	[Kegiatan] Fasilitas Kerjasama Daerah							82.000.000						81.954.700						99.94								
		Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	%		100		100		100		100		100						100						100			
17	[Sub Kegiatan] Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri							82.000.000						81.954.700						99.94								

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	16	1		2		1		1		12					1200						1200				
18	[Program] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.818.924.116						1.459.934.449					80.29									
		Persentase BUMD yang sehat dan profitable	%	87.5	100		100		100		100		100					100						100				
		Persentase jumlah paket tender pengadaan barang jasa yang berhasil	%	92.05	100		100		100		100		100					100						100				
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya	%	100	100		100		100		100		100					100						100				
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100					100						100				

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir				
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026								
19	[Kegiatan] Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							352.610.696						308.304.300						87.43											
		Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Penilaian Mandiri SPIP	Perangkat Daerah	29	27		54		27		27		56					207.41						207.41							
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya	Perangkat Daerah		54		54		54		54		56					103.7						103.7							
20	[Sub Kegiatan] Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							186.017.748						158.369.500					85.15												
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	31	12		12		12		12		12					100						100							
21	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							166.592.948						149.934.800					89.99												
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	Laporan	26	12		12		12		12		12					100						100							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026						
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																											
22	[Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							504.200.000						431.090.699						85.52									
		Jumlah BUMD dan BLUD yang dilakukan pemantauan	organisasi	7	7		7		7		7		7					100							100				
		Persentase Rapat Koordinasi di Bidang Perekonomian yang Difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100					100							100				
23	[Sub Kegiatan] Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							225.000.000						200.270.099						89.01									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	7	3		3		3		3		5					166.67							166.67				

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir			
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026							
24	[Sub Kegiatan] Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							209.200.000						167.772.900						80.19										
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	19	5		5		5		5		8					160							160					
25	[Sub Kegiatan] Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							70.000.000						63.047.700						90.08										
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	11	1		1		1		1		4					400							400					
26	[Kegiatan] Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							666.999.000						519.493.050						77.89										
		Jumlah Perangkat daerah yang dilayani proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Perangkat Daerah	56	54		54		54		54		56					103.7							103.7					
27	[Sub Kegiatan] Pengelolaan							96.999.000						62.262.700						64.2										

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir				
							2024		2025	2026		2024		2025	2026		2024		2025	2026											
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik																														
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	21	1		1		1		1		1					100							100						
28	[Sub Kegiatan] Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							100.000.000						69.621.000					69.63												
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	217	93		93		93		93		216					232.26							232.26						
29	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							470.000.000						387.609.350					82.45												
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	2		2		2		2		5					250							250						
30	[Kegiatan] Pemantauan							295.114.420						201.046.400					68.15												

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Kebijakan Sumber Daya Alam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026						
32	[Program] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							34.586.177.303						31.853.745.525						91.36									
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		117.09					117.09						117.09					
33	[Kegiatan] Penataan Organisasi						415.000.000						413.903.500						99.78										
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100		100		100		100		100					100						100					
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki kinerja dan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan baik	%	100	100		100		100		100		100					100						100					

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik dan tata laksana yang baik	%	100	100		100		100		100		100					100						100				
34	[Sub Kegiatan] Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						139.000.000					138.377.900					99.55											
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	1		1		1		1		4					400						400				
35	[Sub Kegiatan] Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						138.000.000					137.688.000					99.76											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		4		4		4		4						100							100				
36	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						138.000.000					137.837.600					99.87											
		Jumlah Dokumen	Dokumen	11	2		2		2		2		5					250						250				

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
	Komunikasi Pimpinan																											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	991	12		12		12		12		12					100						100				
40	[Sub Kegiatan] Pendokumentasian Tugas Pimpinan							1.090.000.000						1.056.747.680					96.92									
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	934	12		12		12		12		12					100						100				
41	[Kegiatan] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							167.805.000						157.370.800					93.78									
		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	5		5		5		5		5					100						100				
42	[Sub Kegiatan] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							95.275.000						93.730.000					98.39									

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	2		2		2		2		2					100						100			
43	[Sub Kegiatan] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.530.000						63.640.800					87.74									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	3		3		3		3							100						100			
44	[Kegiatan] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.891.094.061						19.044.919.546					95.79									
		Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12		12		12		12							100						100			
45	[Sub Kegiatan] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.716.096.561						18.870.199.546					95.78									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	154	154		154		154		134							87.01						87.01			
46	[Sub Kegiatan] Penyediaan						174.997.500						174.720.000					99.86									

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	12	12		12	12	12	12				100								100		
47	[Kegiatan] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.469.710.260					3.049.673.384						87.93							
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Laporan	12	12	12		12	12	12	12				100								100		
48	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.254.558.000					1.133.352.410						90.39							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12		12	12	12	12				100								100		
49	[Sub Kegiatan] Penyediaan						200.005.000					82.095.000						41.03							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir					
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026								
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	12		12		12		12		12					100							100						
50	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2.015.147.260						1.834.225.974					91.12												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12					100							100						
51	[Kegiatan] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							347.256.000						374.280.000					91.09												
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	32	14		14		14		14		33					235.71							235.71						
52	[Sub Kegiatan] Pengadaan Mebel							89.355.500						92.212.500					74.92												

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	16	6		6		6		6		24					400						400				
53	[Sub Kegiatan] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							257.900.500						282.067.500					97.99									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	7		7		7		7		9					128.57						128.57				
54	[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.229.455.000						1.192.422.656					96.94									
		Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit		5		5		5		5		5					100						100				
55	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas							675.300.000						655.959.935					97.15									

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Operasional atau Lapangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026				
		dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi																									
59	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							50.000.000						36.079.476						72.16							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	1		12		1		1		1					100						100			
60	[Kegiatan] Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							3.404.298.406						2.075.094.943						60.95							
		Tertib administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12		12		12		12		12					100						100			

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir		
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026						
61	[Sub Kegiatan] Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							2.118.298.406						821.379.943						38.78									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	21	2		2		2		2		1					50						50					
62	[Sub Kegiatan] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							140.000.000						113.715.000						81.24									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2					100						100					
63	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan							6.000.000										0											

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
	Wakil Kepala Daerah																								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0	2	2	2	2	0						0									0	
64	[Sub Kegiatan] Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.140.000.000					1.140.000.000					99.96								
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	60	2	2		2	2	1					50									50	
65	[Kegiatan] Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.540.000.000					1.515.945.564					96.14								
		Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Bulan	16	12	12		12	12	12					100									100	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
		daerah yang terpenuhi																							
66	[Sub Kegiatan] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						90.000.000					80.011.200						88.89							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		12	12		12	12		6				50								50		
67	[Sub Kegiatan] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.450.000.000					1.435.934.364						96.62							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	13	12	12		12	12		14				116.67								116.67		
68	[Kegiatan] Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.062.000.000					2.018.614.232						97.94							
		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12		12	12		12				100								100		
69	[Sub Kegiatan] Penyediaan Komponen						40.000.000					39.996.000						100							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							2024		2025	2026		2024		2025	2026		2024		2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RPKD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RPKD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RPKD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
							2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	12		12		12		12		12						100						100			
73	[Sub Kegiatan] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.000.000						28.594.100						89.37									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3								100						100			
74	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.000.000.000						995.218.532						99.53									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	249	160		160		160		160		170						106.25						106.25			
75	[Sub Kegiatan] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000						19.500.000						97.51									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen		12		12		12		12		12						100						100			

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir			
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026						
		Dinamis pada SKPD																											
76	[Kegiatan] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.000.000						19.950.000						99.75									
		Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	1	1		12		1		1		1					100							100				
77	[Sub Kegiatan] Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							20.000.000						19.950.000						99.75									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3		3		3		3		5					166.67							166.67				

Sumber: E-Monev Bappedalitbang

- IKU dan IKK Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. IKU berfungsi sebagai tolok ukur strategis yang secara langsung menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sementara itu, IKK bersifat lebih teknis dan operasional, digunakan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan yang mendukung pencapaian IKU. Keterkaitan antara IKU dan IKK menjadi landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Dengan adanya IKU dan IKK yang terukur, diharapkan kinerja dapat dinilai secara objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Tabel 2.5
IKU Setda Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan IKU	Satuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah	Nilai LKJIP	Hasil Penilaian LKJIP oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas	

Sumber: SK Sekretaris Daerah No.800/27/Tahun 2019

Tabel 2.6
IKU Setda Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan IKU	Satuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan IKU	Satuan
	Instansi Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Daerah diketerbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	
2	Meningkatnya Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP yang sudah dilakukan penjaminan mutu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	-

Sumber: SK Sekretaris Daerah No.800/33/Tahun 2021

Tabel 2.7
IKU Setda Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah/ Bagian Administrasi Pembangunan
2	Meningkatnya Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPIP/ Bagian Administrasi Pembangunan
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi	Capaian kinerja instansi lingkup	Jumlah capaian semua indikator	Dokumen Monitoring dan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
	Lingkup Asisten Administrasi Umum	asisten Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan dibagi jumlah indikator	Evaluasi (Monev)
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah capaian semua indikator Program Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah indikator	Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev)
5	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah capaian semua indikator Program Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah indikator	Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev)
6	Meningkatnya Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Sumber: SK Sekretaris Daerah No.800/6616/ Tahun 2023

Tabel 2.8
IKU Setda Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan IKU	Satuan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyumas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyumas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan IKU	Satuan
		Kabupaten Banyumas		Bagian Organisasi
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Kabupaten Banyumas	Nilai Hasil Evaluasi SPIP Kabupaten Banyumas	Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Bagian Administrasi pembangunan
		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EPPD	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EPPD	Keputusan Menteri Dalam Negeri Bagian Pemerintahan

Sumber: SK Sekretaris Daerah No.0007/19.9/Tahun 2024

IKK Sekretariat Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Tabel 2.9

IKK Setda Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n : $\frac{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif: Jumlah seluruh	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dengan Metode Kompetitif	$\text{pengadaan} \times 100\%$	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan : total belanja operasi dan modal $\times 100\%$	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun $n-1$: Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun $n \times 100\%$	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Sumber: Data yang diolah

d. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

1. Bupati dan Wakil Bupati

Sebagai pengguna utama layanan, berupa dukungan staf dalam perumusan kebijakan, koordinasi, administrasi, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Perangkat Daerah

Mendapatkan layanan koordinasi, pembinaan, fasilitasi kebijakan, serta dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Mendapatkan layanan dukungan dalam penyusunan

kebijakan, penyediaan data/informasi, fasilitasi rapat, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Instansi Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Mendapatkan layanan koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

5. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Secara tidak langsung memperoleh manfaat melalui terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan administrasi publik seperti informasi kebijakan, keprotokolan, dan layanan pengaduan masyarakat.

e. Mitra Sekretariat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas

Menjadi mitra utama dalam koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan program/kegiatan daerah.

2. DPRD Kabupaten Banyumas

Mitra strategis dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, terutama melalui penyediaan data, fasilitasi rapat, serta koordinasi kebijakan daerah.

3. Instansi Vertikal/Forkopimda

Termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga vertikal lainnya sebagai mitra dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum.

4. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan

Mitra dalam penelitian, kajian kebijakan, serta pelaksanaan program kerja sama, termasuk penyediaan tenaga magang atau pendampingan teknis.

5. Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Media Massa

Mitra dalam penyebarluasan informasi, aspirasi publik, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

6. Masyarakat dan Dunia Usaha

Mitra sekaligus penerima manfaat layanan, terutama dalam pemberian masukan, partisipasi, serta kolaborasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, khususnya melalui kontribusi di bidang pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta penyediaan data dan informasi yang relevan untuk perumusan kebijakan. Dukungan BUMD diwujudkan antara lain melalui:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BUMD memberikan dukungan finansial bagi pemerintah daerah melalui setoran laba yang berkontribusi terhadap PAD. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun kebijakan fiskal serta pengelolaan pembangunan daerah.

2. Penyediaan Layanan Publik

Melalui unit usaha di sektor air minum, perbankan daerah, pasar, dan transportasi, BUMD membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan fungsi koordinatif Sekretariat Daerah dalam memastikan ketersediaan layanan dasar.

3. Kemitraan Strategis

BUMD dapat menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan program prioritas daerah, misalnya penyediaan dukungan logistik, jasa keuangan, maupun infrastruktur pelayanan publik, yang pada gilirannya mendukung efektivitas pelayanan Sekretariat Daerah.

4. Sumber Data dan Informasi

Laporan kinerja dan pengelolaan usaha BUMD dapat menjadi bahan masukan bagi Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah, terutama terkait aspek ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya dukungan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dapat lebih optimal dalam melaksanakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pembangunan, sehingga kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan dapat tercapai dengan lebih baik.

g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah

Kerja sama daerah termasuk salah satu urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan. Tugas ini diatur dalam PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan dipertegas dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020. Secara garis besar, kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah meliputi:

1. Kerja Sama Antar Daerah

Kerja sama dengan kabupaten/kota lain atau dengan pemerintah provinsi, misalnya dalam pengelolaan sumber daya air, persampahan, transportasi, pelayanan kesehatan rujukan, atau pengembangan pariwisata terpadu.

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Meliputi kerja sama dengan BUMN, BUMD, swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik atau pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

3. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga/Instansi Pemerintah

Termasuk dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, misalnya kerja sama riset, peningkatan kapasitas SDM, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Peran Sekretariat Daerah dalam Kerjasama Daerah:

1. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengkajian, fasilitasi perjanjian, hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama.

2. Menjamin bahwa kerja sama sesuai dengan visi pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.2. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Transisi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
- 2) Tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan partisipatif
- 3) Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya tercermin dalam pelaporan
- 4) Budaya birokrasi belum mendukung reformasi tata kelola pemerintahan
- 5) Layanan publik belum konsisten mencerminkan prinsip *good governance*

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengingat salah satu tugas pokok Sekretariat Daerah yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang mencakup pemerintahan umum, organisasi, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, fasilitasi hukum, kegiatan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan barang dan jasa dan pelayanan umum, maka terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas secara umum berperan dalam

mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pemerintah Daerah, namun demikian secara substantive berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah sangat berperan dalam mengendalikan, memantau, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait penataan ruang dan lingkungan hidup yang tertuang dalam RTRW dan KLHS dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan.

b. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Transisi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah ***“Peningkatan efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.”***

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan berbagai permasalahan mendasar yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pembinaan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Keberadaan Sekretariat Daerah sangat menentukan keberhasilan koordinasi antar perangkat daerah, kelancaran pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah:

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi antar perangkat daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
- Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- Perlunya penyempurnaan tata kerja berbasis proses bisnis dan manajemen risiko untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Kinerja Aparatur dan Budaya Kerja

- Belum semua aparatur memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai tuntutan tugas jabatan.
- Budaya kerja kolaboratif dan berorientasi hasil (result-based) belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh bagian.
- Masih terbatasnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja (SAKIP, SPIP, dan RB) sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.

3. Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas

- Keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya terwujud.

- Proses cascading kinerja dari tingkat organisasi ke individu belum berjalan optimal, sehingga penyusunan SKP sering belum mencerminkan sasaran strategis Renstra.

4. Pelayanan Administratif dan Dukungan Pimpinan

- Layanan administrasi perkantoran, keuangan, keprotokolan, dan rumah tangga pimpinan belum seluruhnya didukung oleh sistem pelayanan digital dan terintegrasi.
- Masih terdapat kendala dalam penyediaan dukungan data dan informasi yang cepat, akurat, dan relevan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.
- Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah agar lebih berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

5. Akuntabilitas dan Pengendalian Intern

- Pencapaian nilai SAKIP dan SPIP Sekretariat Daerah perlu ditingkatkan melalui penguatan manajemen kinerja dan manajemen risiko.
- Perlu strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju level 4 (terkelola dan terukur).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Rumus	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	Nilai SAKIP berdasarkan LHE SAKIP Pemkab yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	81,79	82	82,5	83	84	85	86
		Nilai EPPD Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,591	3,6	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65
		Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	Indeks Kualitas kebijakan Daerah	67,56	67,8	68	69	70	71	72
		IKM Pemerintah Daerah	Indeks	IKM Pemerintah Daerah	88,41	88,415	88,42	88,5	88,7	88,9	89

		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	3,381	3,39	3,395	3,4	3,41	3,425	3,45
--	--	--	--------	--	-------	------	-------	-----	------	-------	------

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Rumus	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Persentase Unit Pelayanan Publik yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "sangat baik"	%	Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat : Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100 %	41,221	41,984	42,748	43,511	44,274	45,038	45,801
		Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	Indeks Kualitas kebijakan Daerah	67,56	67,8	68	69	70	71	72
		Persentase keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	jumlah indikator LPPD yang dicapai/ seluruh indikator X 100%	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Rumus	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	3,381	3,39	3,395	3,4	3,41	3,425	3,45
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah mengacu pada pedoman	81,79	82	82,5	83	84	85	86

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Rumus	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
				Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Nilai SAKIP perangkat daerah	90	90,1	90,5	91	91,25	91,5	91,75
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,697	3,7	3,75	3,775	3,8	3,825	3,85
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,55	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56

Sumber: E-Planning

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.3

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

STRATEGI	2025-2029				
	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	Penyusunan regulasi/pedoman, penguatan kapasitas dan penataan sistem pemerintahan	Penguatan regulasi dan pedoman, pembenahan sistem pengukuran serta pelaporan kinerja, pelaksanaan sosialisasi/bimtek serta pendampingan intensif kepada Perangkat Daerah, penerapan standar kualitas kebijakan dan survei IKM secara reguler, serta implementasi dan monitoring rencana tindak pengendalian (RTP) secara berkelanjutan	Melaksanakan pemantapan SAKIP berbasis hasil evaluasi melalui perbaikan indikator, target, serta analisis capaian; menyempurnakan kualitas analisis dan narasi LPPD dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah; memperkuat review kualitas kebijakan daerah dan kapasitas perumusannya berbasis data; mengimplementasikan rencana aksi perbaikan layanan beserta penguatan mekanisme pengaduan dan simplifikasi prosedur; serta melakukan evaluasi pengendalian melalui penyempurnaan profil risiko, peningkatan kepatuhan pelaporan SPIP, dan integrasi awal dengan manajemen risiko kinerja	Menguatkan implementasi SAKIP secara terintegrasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan program prioritas; mengoptimalkan penggunaan hasil evaluasi LPPD sebagai dasar penajaman kebijakan; mengintegrasikan hasil evaluasi kebijakan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran termasuk penyesuaian atau pencabutan kebijakan yang tidak efektif; mengembangkan inovasi pelayanan administratif berbasis masukan IKM dan pemanfaatan TI untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan layanan; serta memperkuat penerapan SPIP yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja melalui peningkatan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP bersama APIP/BPKP	Mengoptimalkan SAKIP melalui pemantapan budaya kinerja yang berkesinambungan; memperkuat tata kelola LPPD dengan konsolidasi data lintas urusan, perbaikan indikator lemah, dan penegasan LPPD sebagai dasar pengambilan keputusan strategis; memantapkan tata kelola perumusan kebijakan daerah yang berkualitas, responsif, dan adaptif; meningkatkan kualitas serta konsistensi pelayanan administratif untuk menghasilkan lonjakan signifikan dan berkelanjutan pada IKM; serta memantapkan maturitas SPIP sesuai target melalui konsolidasi dan replikasi praktik baik pengendalian intern di seluruh perangkat daerah.
Penguatan tata kelola kinerja (SAKIP Pemerintah Daerah)	Penataan SAKIP melalui pemetaan IKU/IKD, cascading kinerja sampai Perangkat Daerah, penyusunan pedoman internal SAKIP Setda, dan perbaikan awal kualitas LKjIP	Konsolidasi pelaksanaan SAKIP melalui penguatan perjanjian kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pendampingan intensif PD dengan nilai rendah	Pemantapan SAKIP berbasis hasil evaluasi melalui perbaikan indikator dan target, penguatan analisis capaian dan rekomendasi Tindak Lanjut	Penguatan implementasi SAKIP terintegrasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan program/kegiatan prioritas	Optimalisasi SAKIP dengan pemantapan budaya kinerja untuk peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah secara berkelanjutan

STRATEGI	2025-2029				
	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Nilai EPPD / LPPD)	Penataan dan pemutakhiran data LPPD, sosialisasi kewajiban pelaporan urusan kepada seluruh PD, penyusunan jadwal dan format pelaporan yang seragam	Penguatan mekanisme pengumpulan dan verifikasi data LPPD, peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah dalam pelaporan, pendampingan teknis penyusunan LPPD untuk Perangkat Daerah	Penyempurnaan kualitas analisis dan narasi LPPD, penguatan koordinasi lintas PD untuk pemenuhan indikator kinerja urusan, perbaikan aspek yang bernilai rendah	Optimalisasi penggunaan hasil evaluasi LPPD sebagai dasar perbaikan program/urusan dan penajaman kebijakan daerah	Pemantapan tata kelola LPPD: konsolidasi data lintas urusan, perbaikan berkelanjutan indikator yang lemah, dan penguatan posisi LPPD sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan strategis daerah
Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Pemetaan dan inventarisasi produk kebijakan daerah; identifikasi kelemahan kualitas kebijakan (substentif, prosedural, dan administratif)	Penyusunan dan penerapan pedoman/standar kualitas kebijakan (Naskah Akademik, partisipasi publik, uji dampak), penguatan fungsi koordinasi penyusunan kebijakan.	Penguatan review kualitas kebijakan daerah secara sistematis, peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam perumusan kebijakan berbasis data dan bukti	Integrasi hasil evaluasi kebijakan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyesuaian atau pencabutan kebijakan yang tidak efektif	Pemantapan tata kelola perumusan kebijakan daerah berkualitas tinggi, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan sehingga indeks kualitas kebijakan daerah meningkat
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Penyusunan pemetaan layanan administratif utama Setda dan Perangkat Daerah, penyusunan standar pelayanan dan instrumen survei IKM terpadu	Pelaksanaan survei IKM secara reguler, analisis hasil IKM, penyusunan rencana aksi perbaikan pelayanan administratif	Implementasi rencana aksi perbaikan layanan, penguatan mekanisme penanganan pengaduan, simplifikasi prosedur layanan prioritas	Pengembangan inovasi pelayanan administratif (termasuk pemanfaatan TI) berdasarkan masukan IKM, peningkatan aksesibilitas dan kecepatan layanan	Pemantapan kualitas dan konsistensi pelayanan administratif sehingga IKM Pemerintah Daerah mengalami peningkatan signifikan dan berkelanjutan
Pemantapan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Penyusunan dan/atau pemutakhiran kebijakan dasar SPIP, pemetaan risiko di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah, penyusunan rencana tindak pengendalian	Implementasi rencana tindak pengendalian dan penguatan lingkungan pengendalian, pendampingan intensif Perangkat Daerah dalam penilaian mandiri SPIP	Evaluasi pelaksanaan pengendalian, penyempurnaan profil risiko dan rencana pengendalian, peningkatan kepatuhan pelaporan SPIP, integrasi awal dengan manajemen risiko kinerja	Penguatan penerapan SPIP terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja; peningkatan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP bersama APIP/BPKP	Pemantapan maturitas SPIP pada level yang ditargetkan ; konsolidasi praktik baik pengendalian intern dan replikasi ke seluruh perangkat daerah

Sumber: Data yang diolah

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah	1. Penguatan Tata Kelola Kinerja (SAKIP Pemerintah Daerah) 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (Nilai EPPD) 3. Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Daerah 4. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah 5. Pemantapan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Sumber: Data yang diolah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis organisasi. Program menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah, serta berfungsi untuk menjamin keterpaduan antar kegiatan dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Pelaksanaan program di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas diarahkan untuk:

1. Mendukung Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai Unsur Staf dan Pelaksana Administratif Kepala Daerah
Program berperan dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
Melalui pelaksanaan program yang mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, koordinasi yang baik, serta penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Program diarahkan untuk memperkuat pelayanan administratif lintas perangkat daerah, menciptakan efisiensi birokrasi, dan mendukung digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan.
4. Mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program berperan dalam memperkuat budaya kinerja,

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Melalui pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur agar memiliki kompetensi, integritas, serta etos kerja tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

6. Mendukung Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah dan Koordinasi Pembangunan

Program diorientasikan untuk memperkuat proses penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis, meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai arah pembangunan daerah.

7. Menunjang Fungsi Protokoler dan Dukungan Rumah Tangga Pemerintahan Daerah

Termasuk penyediaan dukungan teknis, logistik, dan keprotokolan untuk kelancaran tugas-tugas pimpinan daerah, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis dan seremonial.

Program di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan payung besar bagi seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian, yang bertujuan memperkuat koordinasi, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan administratif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun Program di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang berfungsi untuk mencapai sasaran kinerja tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Sekretariat Daerah. Kegiatan mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta dukungan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Melalui kegiatan yang mendukung kelancaran koordinasi antar perangkat daerah, perumusan kebijakan strategis daerah, serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi
Kegiatan difokuskan untuk memperkuat integrasi antar sektor dan antar unit kerja, memastikan kebijakan daerah terlaksana secara konsisten, serta mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan Administratif dan Dukungan Manajerial

Kegiatan diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah.

4. Mendorong Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Melalui kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan penilaian EPPD, serta penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko di lingkungan Sekretariat Daerah.

5. Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Kinerja Aparatur

Kegiatan mencakup pembinaan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil kinerja.

6. Memperkuat Kualitas Kebijakan Daerah dan Pelayanan Publik Melalui kegiatan yang mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan kajian, peningkatan koordinasi penyusunan regulasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelayanan publik daerah.

7. Menunjang Fungsi Penunjang dan Protokoler Pemerintahan Daerah

Termasuk kegiatan penyediaan dukungan rumah tangga, keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan pelayanan umum lainnya guna menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Adapun kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3. Administrasi Tata Pemerintahan
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
5. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
6. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
9. Penataan Organisasi
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
19. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah
21. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif

Sub kegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, yang berfungsi sebagai satuan terkecil dalam struktur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sub kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan, serta secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja

Pelaksanaan sub kegiatan di Sekretariat Daerah diarahkan untuk:

1. Mendukung Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi

Sub kegiatan berperan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, antar lembaga, maupun dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Menunjang Kinerja Administratif dan Manajerial

Sub kegiatan memastikan terselenggaranya tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, mulai dari pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, arsip, pelayanan rumah tangga, hingga dukungan logistik bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah.

3. Mendorong Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Layanan Publik

Sub kegiatan dirancang untuk meningkatkan kualitas kinerja

melalui penguatan sistem akuntabilitas (SAKIP), penerapan pengendalian intern (SPIP), serta peningkatan indeks pelayanan publik dan kualitas kebijakan daerah.

4. Mendukung Fungsi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
Sub kegiatan juga mencakup aktivitas perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Kinerja Organisasi
Melalui pelaksanaan sub kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi ASN, pembinaan kedisiplinan, serta peningkatan budaya kerja profesional, inovatif, dan berintegritas.
6. Mendukung Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Dukungan Teknis Pemerintahan
Termasuk penyediaan sarana dan prasarana kerja, dukungan teknis penyusunan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan protokoler, serta penyiapan bahan kebijakan strategis bagi pimpinan daerah.

Sub kegiatan di Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga efektivitas fungsi koordinasi, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah secara menyeluruh. Adapun Sub kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
3. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4. Fasilitasi Bantuan Hukum
5. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
6. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
7. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
8. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

9. Penataan Administrasi Pemerintahan
10. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
11. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
12. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
13. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
14. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
15. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
16. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
17. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
18. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
19. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
20. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
21. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
22. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
23. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
24. Fasilitasi Keprotokolan
25. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
26. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
27. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
34. Pengadaan Mebel
35. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

38. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39. Pemeliharaan Mebel
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
43. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
44. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
46. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
47. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
48. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
49. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
51. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
53. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Target kinerja serta pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.**Target Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.									68.444.779.000		69.834.100.000		71.824.300.000		73.734.700.000		74.671.000.000
					Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	Progres Positif	82,5		83		84		85		86	
					Nilai EPPD Pemerintah Daerah	Nilai	Progres Positif	3,61		3,62		3,63		3,64		3,65	
					Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	Progres Positif	68		69		70		71		72	
					IKM Pemerintah Daerah	Indeks	Progres Positif	88,42		88,5		88,7		88,9		89	
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	Progres Positif	3,395		3,4		3,41		3,425		3,45	
	Meningkatnya kualitas kebijakan								18.038.614.000		18.404.700.000		18.929.200.000		19.432.600.000		19.679.300.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif																
					Persentase Unit Pelayanan Publik yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "sangat baik"	%	Progres Positif	42,748		43,511		44,274		45,038		45,801	
					Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	Progres Positif	68		69		70		71		72	
					Persentase keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	Progres Positif	3,395		3,4		3,41		3,425		3,45	
					Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Progres Positif	82,5		83		84		85		86	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						15.555.102.000		15.870.800.000		16.323.100.000		16.757.200.000		16.970.000.000
				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Predikat Baik	%	Progres Positif	91		92		93		94		95	
					Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	Progres Positif	91		92		93		94		95	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						928.000.000		1.000.797.700		1.067.148.100		1.119.049.300		1.126.821.400
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib administras	Persentase Tingkat Capaian SPM	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				i, serta koordinatif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kewilayahan, dan otonomi daerah													
					Persentase pemenuhan isian dan bukti dukung indikator LPPD	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPJ sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						308.000.000		332.265.900		354.382.700		371.683.100		374.273.800
				Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan	Dokumen	Kumulatif	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				si Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan												
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
				Tertatanya Administrasi Kewilayahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Kumulatif	5		5		5		5		5	
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
				Terfasilitasinya pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Kumulatif	8		8		8		8		8	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						13.649.102.000		13.794.938.700		14.092.421.100		14.405.418.300		14.600.083.400
				Meningkatnya kualitas fasilitas dan dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan,	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	Progres Positif	85		85		85		85		85	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				sosial, dan kemasyarakatan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat													
					Persentase kegiatan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial yang difasilitasi	%	Progres Positif	90		90		90		90		90	
					Persentase bantuan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang terealisasi	%	Progres Positif	90		90		90		90		90	
					Persentase permasalahan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Pemda	%	Progres Positif	90		90		90		90		90	
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						11.649.102.000		11.746.406.900		11.999.655.700		12.278.052.100		12.467.535.800
				Terlaksananya Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kumulatif	3		3		3		3		3	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						1.000.000.000		1.024.265.900		1.046.382.700		1.063.683.100		1.066.273.800
				Terlaksananya kebijakan dan evaluasi kinerja program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Kumulatif	6		6		6		6		6	
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan,						1.000.000.000		1.024.265.900		1.046.382.700		1.063.683.100		1.066.273.800

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Kumulatif	8		8		8		8		8	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						928.000.000		1.000.797.700		1.067.148.100		1.119.049.300		1.126.821.400
				Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi bidang hukum dalam penyelenggaraan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pemerintah daerah yang tertib regulasi, berlandaskan kepastian hukum, dan menjamin akuntabilitas													
					Persentase realisasi produk hukum	%	Progres Positif	30		31		32		33		34	
					Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Kategori Eka Acalapati 76-100)	Nilai	Progres Positif	80		80,5		81		81,5		82	
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
				Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendukung penyelenggaraan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Kumulatif	615		615		615		615		615	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pemerintah daerah													
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
				Terpenuhi hak atas bantuan hukum bagi pemerintah daerah dalam perkara hukum tertentu.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Kumulatif	9		9		9		9		9	
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						308.000.000		332.265.900		354.382.700		371.683.100		374.273.800
				Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, tertib, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung kepastian hukum dan pelayanan publik	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Kumulatif	380		380		380		380		380	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						50.000.000		74.265.900		96.382.700		113.683.100		116.273.800

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terwujudnya kerja sama daerah yang strategis, efektif, dan bermanfaat dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah	Persentase realisasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						50.000.000		74.265.900		96.382.700		113.683.100		116.273.800
				Terwujudnya kerja sama yang efektif, sinergis, dan bermanfaat antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak di dalam negeri untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Kumulatif	24		24		24		24		24	
		4.01.03	PROGRAM						2.483.512.000		2.533.900.000		2.606.100.000		2.675.400.000		2.709.300.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi asisten Perekonomian dan Pembangunan	Organisasi	Progres Positif	91		92		93		94		95	
					Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	Kumulatif	91		92		93		94		95	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						678.018.000		698.799.750		744.510.500		793.090.250		823.887.500
				"Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, dan kebijakan di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber	Persentase BLUD yang memenuhi rasio keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)	%	Progres Positif	32,6		34,78		36,95		39,13		41,3	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				daya alam guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan"													
					Persentase BUMD ROA sangat sehat	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Persentase pengembangan produk unggulan daerah	%	Progres Positif	33,33		50		66,66		100		100	
					Persentase capaian angka inflasi Kabupaten Banyumas sesuai target nasional pemerintah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						250.000.000		250.000.000		254.414.875		257.868.250		258.385.375
				Terlaksananya pengelolaan BUMD dan BLUD yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring	Dokumen	Kumulatif	5		5		5		5		5	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				terkoordinasi, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah	dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD												
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						250.000.000		250.000.000		254.414.875		257.868.250		258.385.375
				Terwujudnya stabilitas perekonomian daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Kumulatif	8		8		8		8		8	
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						178.018.000		198.799.750		235.680.750		277.353.750		307.116.750
				Tersusunnya perencanaan dan terlaksananya pengawasan terhadap pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil yang terarah,	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Kumulatif	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				berkelanjutan, dan sesuai ketentuan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi lokal													
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						627.475.000		637.705.750		646.535.500		653.442.250		654.476.500
				Meningkatnya efektivitas koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah secara tepat waktu, terukur, dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP minimal di Level 3	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Tingkat efisiensi anggaran program perangkat daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						327.475.000		332.861.875		337.276.750		340.730.125		341.247.250

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terkendalinya pelaksanaan program pembangunan dan tersedianya hasil evaluasi yang akurat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						300.000.000		304.843.875		309.258.750		312.712.125		313.229.250
				Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara tertib, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				dan peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan													
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						928.019.000		942.550.625		955.795.250		966.155.375		967.706.750
				Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	Progres Positif	73,31		74,31		75,31		76,31		77,31	
					Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	24		25,5		27		28,5		30	
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Progres Positif	44,5		46		48		49		50	
					Persentase jumlah	%		42		42,5		43		43,5		44	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif												
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						300.000.000		304.843.875		309.258.750		312.712.125		313.229.250
				Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Kumulatif	5		5		5		5		5	
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						328.019.000		332.862.875		337.277.750		340.731.125		341.248.250
				Terselenggaranya proses pengadaan barang dan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan	Dokumen	Progres Positif	1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				jasa secara elektronik yang efektif, transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Secara Elektronik												
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						300.000.000		304.843.875		309.258.750		312.712.125		313.229.250
				Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan, profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman para pelaksana dan pemangku kepentingan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Kumulatif	126		126		126		126		126	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						250.000.000		254.843.875		259.258.750		262.712.125		263.229.250
				Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan peraturan pengelolaan SDA (Pelaku Usaha diantaranya: Distributor pupuk bersubsidi, Agen LPG, dan SPBU)	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						250.000.000		254.843.875		259.258.750		262.712.125		263.229.250
				Terwujudnya kebijakan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,	Dokumen	Kumulatif	6		6		6		6		6	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				terkoordinasi, selaras, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja												
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah								50.406.165.000		51.429.400.000		52.895.100.000		54.302.100.000		54.991.700.000
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	90,5		91		91,25		91,5		91,75	
					Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	3,75		3,775		3,8		3,825		3,85	
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN						50.406.165.000		51.429.400.000		52.895.100.000		54.302.100.000		54.991.700.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi Asisten Administrasi Umum	%	Progres Positif	91		92		93		94		95	
					Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Administrasi Umum dengan Predikat Baik.	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.165.000		348.165.000		386.905.270		417.209.000		421.746.892
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Perangkat Daerah													
					Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.165.000		124.165.000		143.535.135		158.687.000		160.955.946
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kumulatif	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000		224.000.000		243.370.135		258.522.000		260.790.946
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan objektif untuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	Kumulatif	11		11		11		11		11	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik													
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.900.000.000		28.900.000.000		28.977.480.540		29.038.088.000		29.047.163.784
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28.600.000.000		28.600.000.000		28.658.110.405		28.703.566.000		28.710.372.838
				Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bulan	Progres Positif	177		177		177		177		177	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kesejahteraan dan kinerja ASN	Tunjangan ASN												
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						300.000.000		300.000.000		319.370.135		334.522.000		336.790.946
				Terselenggaranya administrasi yang lengkap, tertib, dan akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
				Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang sesuai standar, tepat waktu, dan dalam kondisi baik untuk mendukung penampilan profesional aparatur pemerintahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Progres Positif	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.850.000.000		5.050.000.000		5.185.590.945		5.291.654.000		5.307.536.622

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	95		95		95		95		95	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	81		82		83		84		85	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	49		49		50		50		50	
					IKM Perangkat Daerah XXX	Angka	Progres Positif	94,75		95		95,25		95,5		95,75	
					IKM Layanan Umum Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	94,75		95		95,25		95,5		95,75	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	67		67,25		67,5		67,75		68	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya	Jumlah Paket Komponen	Paket	Kumulatif	5		5		5		5		5	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				komponen instalasi listrik dan penerangan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar teknis untuk mendukung operasional dan kenyamanan bangunan kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, berkualitas, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai, berkualitas, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan fasilitas kantor atau rumah dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000.000		2.000.000.000		2.019.370.135		2.034.522.000		2.036.790.946
				Tersedianya bahan logistik kantor yang cukup, berkualitas, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran administrasi dan dokumentasi di lingkungan kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.000.000.000		2.000.000.000		2.019.370.135		2.034.522.000		2.036.790.946
				Terwujudnya koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang efektif antar SKPD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				an dan pembangunan daerah secara terpadu dan terarah													
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
				Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib, terorganisir, dan mudah diakses untuk mendukung kelancaran administrasi dan akuntabilitas SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						550.000.000		700.000.000		758.110.405		803.566.000		810.372.838
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersediany a mebel yang berkualitas, sesuai kebutuhan, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan ruang kerja di lingkungan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersediany a peralatan dan mesin pendukung operasional yang berkualitas, sesuai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	7		7		7		7		7	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				kebutuhan, dan tepat waktu untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan layanan di lingkungan kantor													
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000		200.000.000		219.370.135		234.522.000		236.790.946
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang lengkap, berkualitas, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional dan pelayanan publik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.250.000.000		4.250.000.000		4.308.110.405		4.353.566.000		4.360.372.838

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.500.000.000		1.500.000.000		1.519.370.135		1.534.522.000		1.536.790.946
				Tersedianya layanan komunikasi, air bersih, dan listrik yang handal, berkualitas, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						250.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				yang optimal guna mendukung kelancaran aktivitas operasional dan administrasi	Kantor yang Disediakan												
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.500.000.000		2.500.000.000		2.519.370.135		2.534.522.000		2.536.790.946
				Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran yang profesional, efisien, dan berkesinambungan guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi di lingkungan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.550.000.000		1.798.336.000		1.895.186.675		1.970.946.000		1.982.290.730

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Progres Positif	70		70		70		70		70	
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000		1.000.000.000		1.019.370.135		1.034.522.000		1.036.790.946
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional /lapangan dalam kondisi layak jalan, legal, dan siap pakai untuk mendukung mobilitas dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	170		170		170		170		170	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				kelancaran tugas kedinasan													
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						150.000.000		175.000.000		194.370.135		209.522.000		211.790.946
				Terpeliharanya mebel kantor dalam kondisi baik, layak pakai, dan sesuai fungsi guna mendukung kenyamanan serta kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000		175.000.000		194.370.135		209.522.000		211.790.946
				Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor dalam kondisi optimal, aman, dan siap pakai untuk mendukung kelancaran operasional dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	10		10		10		10		10	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pelayanan administras													
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000		248.336.000		267.706.135		282.858.000		285.126.946
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik, aman, fungsional, dan representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Progres Positif	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000		200.000.000		219.370.135		234.522.000		236.790.946
				Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Progres Positif	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				kondisi layak, aman, dan fungsional untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan													
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi						928.000.000		1.000.000.000		1.058.110.405		1.103.566.000		1.110.372.838
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase unit pelayanan publik dengan nilai Indeks Pelayanan Publik dalam kategori “Baik”	%	Progres Positif	31		32		33		34		35	
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Nilai	Progres Positif	39,2		39,5		39,7		39,9		40	
		X.XX.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						300.000.000		324.000.000		343.370.135		358.522.000		360.790.946
				Terwujudnya struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tersedianya informasi jabatan yang akurat untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Kumulatif	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan						300.000.000		324.000.000		343.370.135		358.522.000		360.790.946

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tata Laksana														
				Terselenggara pelayanan publik yang prima serta tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Kumulatif	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						328.000.000		352.000.000		371.370.135		386.522.000		388.790.946
				Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Kumulatif	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.828.000.000		1.876.000.000		1.934.110.405		1.979.566.000		1.986.372.838
				Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Indeks	Progres Positif	77		78		79		80		81	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pimpinan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik													
					Persentase pelayanan informasi kegiatan pimpinan yang dipublikasi	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokol an						314.000.000		338.000.000		357.370.135		372.522.000		374.790.946
				Terlaksananya layanan keprotokol an yang tertib, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung kelancaran acara/acara resmi pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						314.000.000		338.000.000		357.370.135		372.522.000		374.790.946
				Terwujudnya	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				komunikasi yang efektif, efisien, dan terkoordinasi antara pimpinan daerah dengan internal organisasi, mitra kerja, dan masyarakat	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												
		X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1.200.000.000		1.200.000.000		1.219.370.135		1.234.522.000		1.236.790.946
				Tersimpannya seluruh dokumentasi kegiatan dan keputusan pimpinan secara lengkap, sistematis, dan mudah diakses untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala						4.500.000.000		4.756.899.000		5.583.384.540		6.490.373.000		7.105.097.784

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
				Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.000.000.000		2.000.000.000		2.019.370.135		2.034.522.000		2.036.790.946
				tersedianya hak keuangan (gaji dan tunjangan) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	Progres Positif	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						150.000.000		170.000.000		189.370.135		204.522.000		206.790.946
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Progres Positif	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
				terlaksananya pemeriksaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	Progres Positif	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				n kesehatan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh sebagai upaya preventif untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepemimpinan daerah	Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
		X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.300.000.000		2.536.899.000		3.305.274.135		4.166.807.000		4.774.724.946
				Tersalurnya dana penunjang operasional secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan kepada pejabat yang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	Progres Positif	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				berhak, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat													
		X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						2.700.000.000		2.700.000.000		2.738.740.275		2.769.044.000		2.773.581.890
				Optimalnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	Progres Positif	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan secara tepat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				waktu dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah													
		X.XX.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga						800.000.000		800.000.000		838.740.275		869.044.000		873.581.890

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Sekretariat Daerah														
				ersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran operasional tugas-tugas kedinasan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	Kumulatif	12		12		12		12		12	

Sumber: E-planning

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan tujuan pemerintah daerah salah satunya adalah meningkatnya daya saing daerah. Tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan inovatif, sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang berperan dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian administrasi pemerintahan menetapkan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, sekaligus meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kebijakan, kegiatan, dan inisiatif strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan utama dalam periode perencanaan tertentu. Program ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan janji kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan rencana kerja tahunan maupun rencana strategis organisasi.

Berikut ini adalah matriks keterkaitan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten banyumas:

Tabel 4.2

Keterkaitan Misi Pemerintah Daerah dengan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan Pemkab	Sasaran Pemkab	Tujuan Sekretariat Daerah	Sasaran Sekretariat Daerah	Program Prioritas
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif	Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Data yang diolah

Program prioritas berfungsi untuk memusatkan sumber daya dan perhatian pemerintah pada isu-isu pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan sosial dan lingkungan. Melalui penetapan program prioritas, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih terarah, efektif, efisien, dan berkesinambungan, dengan hasil yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah/ Trilas Program Bupati terpilih Banyumas Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Pasti Sekolah
2. Insentif Guru Ngaji, operasional Pesantren, Organisasi Keagamaan, RT/RW dan BPD
3. Mewujudkan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas
4. Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
5. Pengembangan Desa Wisata dengan melibatkan BUMDES
6. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
7. Revitalisasi Pasar Tradisional yang Aman dan Nyaman
8. Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan
9. Mewujudkan Swasembada Pangan Lokal Menuju Kesejahteraan Petani
10. Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan
11. Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota
12. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat
13. Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif

Dari 13 (tiga belas) program tersebut, beberapa program prioritas, seperti Program Pasti Sekolah serta Program Insentif Guru Ngaji, Operasional Pesantren, Organisasi Keagamaan, RT/RW memiliki keterkaitan langsung dengan subkegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah.

Melalui subkegiatan tersebut, Sekretariat Daerah berperan dalam fasilitasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan maupun dukungan administratif agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan ini mencerminkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung utama kepala daerah dalam memastikan bahwa kebijakan prioritas, terutama yang menyentuh aspek pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan sosial masyarakat, dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyumas.

Berikut ini adalah detail subkegiatan yang terkait dengan Program Prioritas daerah di Kabupaten Banyumas:

Tabel 4.3

Detail Subkegiatan terkait Program Prioritas Kab. Banyumas

No	Subkegiatan	Program Prioritas
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Proram Pasti Sekolah berupa Beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 2. Insentif guru ngaji, operasional pesantren
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Insentif organisasi keagamaan

Sumber: Data yang diolah

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mencerminkan hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis. IKU berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut adalah IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029:

Tabel 4.4

IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN
Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka
	Nilai EPPD Pemerintah Daerah	Nilai
	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks
	IKM Pemerintah Daerah	Indeks
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks
Meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Persentase Unit Pelayanan Publik yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "sangat baik"	%
	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN
	Persentase keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah	%
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka

Sumber: E-Planning

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinatif, administratif, serta pelayanan manajerial kepada kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diukur secara terarah dan objektif untuk memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah adalah terkait dengan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	%	21,56	22,5	24	25,5	27	28,5	30
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40,78	42,5	44,5	46	48	49	50
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	40,94	41,5	42	42,5	43	43,5	44

Sumber: E-Planning

BAB V

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Sekretariat Daerah menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Sekretariat Daerah agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS NUR HADIE

LAMPIRAN

LAMPIRAN REGISTER RISIKO STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2026

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah ada	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	1	Nilai EPPD Kabupaten Banyumas	LPPD tidak disampaikan tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan.	Kurangnya SDM yang memahami tata kelola pelaporan, lemahnya sistem pelaporan	Skor EPPD turun karena tidak memenuhi indikator administrasi dan transparansi	Pemerintah Daerah	Bimtek untuk operator penyusunan LPPD pada Perangkat Daerah		1. Operator atau penyusunan LPPD tidak diikuti serentak, sehingga hasil bimtek tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelaporan	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bimtek) LPPD bagi operator dan pejabat terkait	Sekretaris Daerah, Bagian Pemerintahan	Tahun 2026

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah ada	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
										2. Tidak dilakukannya pre-test dan post-test atau penilaian hasil belajar peserta, sehingga tidak diketahui apakah tujuan pelatihan tercapai			
		2	Indeks Kualitas kebijakan Daerah	Ketidaksiuaian Kebijakan Daerah dengan	Kurangnya harmonisasi regulasi, tidak adanya	Kebijakan dianggap bertentangan dengan kebijakan	Pemerintah Daerah	Forum koordinasi lintas sektor		1. Kehadiran peserta lintas sektor tidak represe	1.Melaksanakan forum koordinasi lintas sektor secara berkala	Sekretaris Daerah, Bagian Hukum	Tahun 2026

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah ada	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
				n Kebijakan Nasional	a review regulasi berkala	n nasional, menurunkan aspek kepatuhan dalam penilaian indeks				ntatif atau tidak konsisten, PD penting sering tidak hadir atau hanya mengirim perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan	2. Melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam proses penyusunan kebijakan strategis daerah		

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah ada	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
										bersifat administratif atau simbolis			
		3	IKM Pemerintah Daerah	Minimnya Pelibatan Masyarakat dalam Evaluasi Layanan	Hasil survei tidak ditindaklanjuti	Pemerintah tidak mengetahui titik lemah layanan sehingga tidak ada perbaikan akibatnya IKM stagnan atau menurun	Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan survei IKM minimal 1 kali dalam setahun oleh PD pelayanan publik		1. Frekuensi survei tidak cukup untuk menangkap dinamika layanan sepanjang tahun. Biasanya survei hanya dilakukan sekali,	Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas hasil survei IKM dan menetapkan penanggung jawabnya	Sekretaris Daerah, Bagian Organisasi	Tahun 2026

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah ada	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
										sehingga tidak merefleksikan perubahan atau perbaikan layanan secara berkelanjutan			